

Repetisi dalam Tajuk Rencana Suara Merdeka 1998-2004: Dekonstruksi Bahasa Pers Era Reformasi

**Nikolaus Rendi P. Hadi¹⁾, Sintaria Kusumaningrum²⁾,
Slavian O. Delastyanto³⁾**

¹Peneliti Komunitas Driyarkara
email: nikolaus_rendi@yahoo.com

²YSKI Semarang
email: sintaria.kusuma@yski.or.id

³YSKI Semarang
email: slavian.okta@yski.or.id

Abstract

The focus of the research was to describe repetition in Editorial of Suara Merdeka 1998-2004 edition as the characteristic of the press language in the reform era. This was a qualitative descriptive research. The researchers gathered data by observing from its lexical cohesion aspects and classifying based on its repetition. The result of the data in this study found that press language in reform era presented reliable and transparent information, and on the contrary it shows the big distinction during new order era which was euphemistic. The press presented actual topics and dare to break-through delivering the news which dealt with the press prohibition era at that time.

Keywords: repetition, editorial, press, Suara Merdeka.

1. Pendahuluan

Setiap hari manusia berkomunikasi dengan menggunakan bahasa. Bahasa dalam pemakaian selalu berupa wacana. Sumarlam, dkk. (2009: 15) menjelaskan bahwa wacana adalah satuan bahasa terlengkap yang dinyatakan secara lisan atau secara tertulis, yang dilihat dari struktur lahirnya (dari segi bentuk) bersifat kohesif, saling terkait dan dari struktur batinnya (dari segi makna) bersifat koheren, terpadu.

Bahasa merupakan alat vital dalam berkomunikasi. Interaksi sosial manusia yang melalui bahasa dalam kehidupan sehari-hari sangat beragam. Wujud interaksi tersebut merupakan bentuk konkret suatu wacana. Sumarlam, dkk. (2009: 4) menjelaskan bahwa dengan adanya wacana untuk berkomunikasi dan melakukan interaksi sosial maka dapat ditegaskan bahwa fungsi tekstual pada hakikatnya merupakan sarana bagi terlaksananya kedua fungsi lainnya, yaitu fungsi ideasional dan fungsi interpersonal.

Pada dasarnya fungsi wacana identik dengan fungsi bahasa. Dikatakan demikian karena wacana merupakan rekaman kebahasaan yang utuh dalam peristiwa komunikasi. Beberapa hal tersebut secara tidak langsung juga menjelaskan eratnya hubungan antara bahasa dan wacana. Salah satu wacana yang sangat populer dalam beberapa abad terakhir adalah media cetak berupa koran. Meskipun dewasa ini masyarakat mulai beralih ke media digital, tidak bisa dipungkiri bahwa media *mainstream* tersebut masih sangat diminati.

Bahasa pers memiliki ciri khasnya masing-masing pada sebuah zaman. Kekhasan tersebut bisa meliputi gaya bahasa, gaya penulisan, ejaan, topik tertentu, bahkan mencerminkan kebijakan politik tertentu akibat intervensi kekuasaan. Misalnya pada medio akhir 40-an, surat kabar nasional banyak yang bertemakan nasionalisme dan perjuangan; akhir medio 50-an tentang revolusi; akhir medio 60-an tentang stabilitas nasional di bawah orde baru; atau medio 70-an tentang pembangunan, stabilitas nasional; dan sebagainya.

Intervensi kekuasaan sedikit banyak juga mempengaruhi konten dan bahasa pers di Indonesia. Misalnya ketika pemerintah orde pada tahun 1995 memberlakukan kebijakan Pencanangan Berbahasa Indonesia yang Baik dan Benar. Segala hal yang berbau bahasa asing pada saat itu di-Indonesia-kan¹. Konten berita pada waktu itu juga sangat dibatasi oleh pemerintah. Berita tidak boleh menyinggung hal-hal yang dianggap sensitif oleh penguasa. Dalam hal ini, tentu masih segar dalam ingatan mengenai pemberedelan² media nasional seperti *Tempo*, *Editor*, *Detik*, dan *Prioritas* karena sikap kritisnya. Jangankan media, individu yang bersikap kritis saja dapat dicituk dengan cap subversif.

Memasuki era reformasi, kebebasan yang didambakan selama kurang lebih tiga puluh dua tahun akhirnya terealisasi. Segala bidang terjadi perubahan

¹ Nikolaus Rendi P. Hadi, "Bahasa Indonesia sebagai Identitas Bangsa dalam Tantangan," dalam *Majalah Pendidikan Genta* No. 303 Tahun XII (19 November-4 Desember 2016), hlm. 16.

² Dewi Yuliati, dkk. *Melacak Jejak Pers Jawa Tengah*, (Semarang, 2008), hlm.41. Awal pemberedelan massal terjadi pada 1974, antara lain harian *Kami*, *Indonesia Raya*, *Nusantara*, *Abadi*, *The Jakarta Times*, *Pedoman*, *Suluh Berita*, *Indonesia Pos*, *Mahasiswa Indonesia*, *majalah Ekspres*, *Wenang*, *Berita Buana*, *waktu*, *Sinar Indonesia Baru*, *Prioritas*, *Topik*, *Dunia Film*, *Gaya*, *Matahari*, *Fokus*, *Monitor*, *Tempo*, *Editor*, *Detik*, (*Merdeka*, *Kompas*, *Sinar Harapan*, *Pelita*, *Pos Sore*, *The Indonesian Times*, *Sinar Pagi*—diberangus kopkamtib selama dua minggu).

yang kian signifikan, termasuk pers. Intervensi kekuasaan mulai memudar satu per satu. Bahasa pers kian lugas dan independen. Pers mulai terbiasa membahas hal-hal yang dianggap sensitif pada masa orde baru. Misalnya topik mengenai dwifungsi ABRI, masalah politik, masalah Papua, pelanggaran HAM, dan sebagainya. Hal tersebut dapat terlihat dari beberapa Tajuk Rencana/editorial dalam harian lokal maupun nasional.

Meskipun demikian, ternyata belum banyak kajian yang membahas bahasa pers pada awal reformasi. Hal tersebut melatarbelakangi penulis untuk meneliti lebih dalam mengenai bahasa pers di era reformasi. Fokus kajian dalam penelitian ini adalah menguraikan repetisi dalam Tajuk Rencana Suara Merdeka 1998-2004 sebagai cermin/ kekhasan bahasa pers pada era reformasi. Repetisi dapat menjelaskan lebih lanjut mengenai topik-topik dominan yang dibahas dalam suatu wacana.

Penelitian ini sengaja memilih Tajuk Rencana yang terbit pada rentang 1998-2004 karena dalam kurun waktu tersebut dianggap sebagai periode yang sangat penting di Indonesia. Kristiadi (2004: xv) mengatakan bahwa periode tersebut merupakan suatu masa kritikal yang dihadapi oleh suatu bangsa yang sedang ingin menemukan kembali jati dirinya serta sedang berusaha melakukan perubahan tatanan politik yang mendasar.

Suara Merdeka sengaja dipilih peneliti sebagai objek kajian karena merupakan surat kabar terbesar di Jawa Tengah³. Harian ini dianggap dapat mewakili bahasa pers di Indonesia karena sudah terbit sejak 1950⁴. Meskipun sudah berdiri beberapa dekade dan tidak pernah diberedel, bukan berarti Suara Merdeka tidak kritis terhadap pemerintah. Tercatat, Suara Merdeka pernah mendapat peringatan keras dari pemerintah orde baru, bersama sejumlah media seperti harian *Waspada* dan *Sinar Indonesia Baru* (Medan)⁵.

³ *Ibid.* hlm. 55.

⁴ *Ibid.* hlm. 42.

⁵ *Ibid.* hlm. 41.

2. Landasan Teori

2.1. Definisi Wacana

Banyak linguist yang berusaha mendefinisikan wacana (*discourse*). Istilah ‘wacana’ berasal dari bahasa Sanskerta *wac/ wak/ vak*, yang artinya ‘berkata’, ‘berucap’ (Douglas dalam Mulyana, 2005: 3). Dalam Kamus Bahasa Jawa Kuno-Indonesia karangan Wojowasito (dalam Mulyana, 2005: 3), terdapat kata *waca* yang berarti ‘baca’, kata *u/ amaca* yang artinya ‘membaca’, *pamacan* (pembacaan), *ang/ mawacana* (berkata), *wacaka* (mengucapkan), dan *wacana* yang artinya ‘perkataan’.

Istilah ‘wacana’ dan ‘teks’ sering digunakan oleh banyak orang. Ada dua pendapat yang berseberangan mengenai hakikat kedua istilah tersebut. Pendapat pertama memandang bahwa wacana dan teks adalah suatu konsep yang berbeda. Brown dan Yule (1996: 6) mengatakan bahwa teks adalah realisasi bahasa lisan dan tulis. Teks dipakai sebagai istilah teknis, untuk mengacu pada rekaman verbal tindak komunikasi.

Brown dan Yule (1996: 24) menambahkan lagi bahwa teks cetak itu sendiri tidak melibatkan pertimbangan bagaimana produk itu dibuat atau diterima. Sementara itu, mengenai wacana mereka berpendapat bahwa menganggap kata-kata, frase-frase dan kalimat-kalimat yang muncul dalam rekaman tekstual suatu wacana sebagai bukti usaha pembuat (penutur/ penulis) untuk mengkomunikasikan pesannya kepada penerima (pendengar/ pembicara). Dengan demikian, Brown dan Yule menilai bahwa teks dipandang sebagai produk yang mengesampingkan pertimbangan bagaimana teks itu dibangun oleh penciptanya; sedangkan wacana merupakan proses yang memperhitungkan semua upaya dalam membangun teks demi membangun dan mengungkapkan makna.

Pendapat kedua memandang bahwa teks dan wacana adalah suatu konsep yang sama. Halliday dan Hasan mempunyai beberapa pendapat mengenai teks. Mereka mengatakan bahwa teks dan wacana adalah sama. Di antara beberapa pendapatnya, mereka menyatakan bahwa teks adalah sebagai berikut.

A text is a unit of language in use. It is not a grammatical unit, like a clause or sentence; and it is not defined by its size. A text is sometimes envisaged to be some kind of super-sentence, a grammatical unit that is larger than a sentence

but it is related to a sentence in the same way that a sentence is related to a clause, a clause to a group and so on (Halliday dan Hasan, 1976:1).

Berdasarkan pendapat di atas, Halliday dan Hasan menyatakan bahwa sebuah teks terdiri dari beberapa kalimat sehingga hal itulah yang membedakannya dengan pengertian kalimat tunggal. Teun van Dijk (dalam Lubis, 1991: 21) juga menyatakan bahwa teks sama dengan *discourse*, yaitu kesatuan dari beberapa kalimat yang satu dengan yang lain terikat dengan erat. Dalam hal ini, penulis menggunakan pendapat kedua yang menyatakan bahwa wacana dan teks pada hakikatnya adalah sama, dengan penjelasan bahwa teks Tajuk Rencana dalam Suara Merdeka merupakan sebuah wacana yang memiliki kesatuan makna yang utuh, tanpa mengesampingkan proses (sebagaimana yang dimaksud oleh Brown dan Yule) pembentukan wacana tersebut. Kata ‘wacana’ merupakan padanan kata dari istilah bahasa Inggris *discourse*⁶.

Unsur yang tidak terlepas dari wacana antara lain adalah kohesi⁷ (leksikal dan gramatikal), koherensi⁸, topik wacana⁹, judul wacana¹⁰. Wacana dikatakan kohesif apabila antarbagian saling erat hubungannya. Kohesi terdiri dari leksikal dan gramatikal. Penelitian ini hanya memperhatikan kohesi/ alat pemikat gramatikal dan perannya dalam pembentukan keutuhan sebuah wacana Tajuk Rencana melalui teori analisis wacana.

2.2. Kohesi Leksikal

Kohesi dibagi menjadi dua: kohesi leksikal dan gramatikal. Kohesi gramatikal terdiri dari referensi, substitusi, elipsis, dan konjungsi. Sedangkan kohesi leksikal terdiri dari repetisi, hiponimi, sinonimi, antonimi, kolokasi, dan

⁶ Mulyana, *Op. Cit.*, hal. 4. Oetomo menjelaskan bahwa kata ‘discourse’ berasal dari bahasa latin ‘discursus’ yang berarti ‘lari ke sana kemari’, ‘lari bolak-balik’. Perkembangan asal-usul kata itu dapat digambarkan sebagai berikut: *dis + currere – discursus - discourse* (wacana).

⁷ Lihat, Kushartanti, dkk. (ed.), *Pesona Bahasa: Langkah Awal Memahami Linguistik*. hal. 96. Keadaan unsur-unsur bahasa yang saling merujuk dan berkaitan secara semantis itu disebut *kohesi*. Dengan kohesi, sebuah wacana menjadi padu: setiap bagian pembentuk wacana mengikat bagian lain secara mesra dan wajar.

⁸ *Ibid*, hal 101. *Koherensi* adalah ‘keberterimaan suatu tuturan atau teks karena kepaduan semantisnya’. Secara lebih spesifik, *koherensi* diartikan sebagai ‘hubungan antara teks dan faktor di luar teks berdasarkan pengetahuan seseorang’.

⁹ Wujud topik dapat berupa frasa atau kalimat yang menjadi topik pembahasan.

¹⁰ Mulyana, *Op. Cit.* hal 43. Mulyana menjelaskan bahwa judul wacana adalah bagian terkecil dari keseluruhan wacana. Sifatnya sangat spesifik dan informatif, dan biasanya langsung mengarah pada isi wacana (karangan).

ekuivalensi. Penelitian ini fokus pada salah satu sarana kohesi leksikal, yaitu repetisi. Menurut Kushartanti, dkk. (2007: 98), kohesi leksikal adalah hubungan semantis antarunsur pembentuk wacana dengan memanfaatkan unsur leksikal atau kata. Sementara itu Mulyana (2005: 29) menjelaskan bahwa kohesi leksikal atau perpaduan leksikal adalah hubungan leksikal antara bagian-bagian wacana untuk mendapatkan keserasian struktur secara kohesif.

2.3. Repetisi

Repetisi adalah bentuk pengulangan kata, frasa, atau klausa. Menurut para ahli, repetisi dibedakan ke dalam beberapa jenis sebagai berikut: (1) repetisi epizeuksis, yaitu pengulangan satuan lingual (kata) yang dipentingkan beberapa kali secara berturut-turut (Sumarlam, dkk., 2009: 35); (2) repetisi tautotes, ialah pengulangan satuan lingual (sebuah kata beberapa kali dalam sebuah konstruksi (Sumarlam, dkk., 2009: 36); (3) repetisi anafora ialah pengulangan satuan lingual berupa kata atau frasa pertama pada tiap baris atau kalimat berikutnya (Sumarlam, dkk., 2009: 36); (4) repetisi epistrofa, yaitu pengulangan satuan lingual kata/ frasa pada akhir baris (dalam puisi) atau akhir kalimat (dalam prosa) secara berturut-turut (Sumarlam, dkk., 2009: 37); (5) repetisi simploke, ialah pengulangan satuan lingual pada awal dan akhir beberapa baris/ kalimat berturut-turut (Sumarlam, dkk., 2009: 37); (6) repetisi mesodiplosis, ialah pengulangan satuan lingual di tengah-tengah baris atau kalimat secara berturut-turut (Sumarlam, dkk., 2009: 37); (7) repetisi epanalepsis, ialah pengulangan satuan lingual, yang kata/ frasa terakhir dari baris/ kalimat itu merupakan pengulangan kata/frasa pertama (Sumarlam, dkk., 2009: 38); dan (8) repetisi anadiplosis, ialah pengulangan kata/ frasa terakhir dari baris/ kalimat itu menjadi kata/ frasa pertama pada baris/ kalimat berikutnya (Sumarlam, dkk., 2009: 38).

2.4. Konstruksi Bahasa Pers Orde Baru

Begitu terbatasnya mengekspresikan wacana di masa itu mencerminkan betapa intervensi kekuasaan benar-benar memengaruhi bahasa media. Pers pada saat orde baru diatur dengan berbagai peraturan menteri dan undang-undang yang sangat ketat, seperti Ketetapan MPRS No. XXXII/MPRS/1966 tentang pembatasan terhadap kebebasan pers; UU No. 11 Tahun 1966; Peraturan Menteri

Penerangan No. 03/Per/Menpen/1969; UU No. 21/1982; dan Peraturan Menteri Penerangan No. 01/Per/Menpen/1984.

Dalam SK Menpen No. 29/SK/M/ 1965 tentang norma-norma pokok perusahaan pers dalam rangka pembinaan pers Indonesia, surat kabar dikategorikan sebagai alat politik. Maka yang boleh menerbitkannya hanya partai politik atau organisasi massa¹¹. Secara implisit semakin jelaslah bahwa bahasa pers pun dikebiri sedemikian rupa oleh penguasa saat itu. Selain itu, ciri pemberitaan pers pada waktu orde baru bergaya eufemistik¹².

3. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data yang bersifat deskriptif, berupa kata-kata, kalimat, dan wacana deskriptif. Hasil analisis dari data tersebut selanjutnya akan dijelaskan dengan menggunakan metode penyajian informasi.

Melalui metode deskriptif analitis, peneliti akan menganalisis kohesi gramatikal yang membentuk keutuhan wacana Tajuk Rencana dari harian Suara Merdeka antara tahun 1998-2004. Kemudian data diklasifikasikan dan dianalisis menurut aspek kohesi leksikal yang menjadi unsur utama pendukung keutuhan wacana. Data dianalisis berdasarkan teknik analisis wacana.

Penelitian ini juga menggunakan metode agih, berupa teknik baca markah. Teknik baca markah adalah teknik baca dengan melihat langsung pemarkah yang bersangkutan. Pemarkahan itu menunjukkan kejatian satuan lingual atau identitas konstituen tertentu; dan kemampuan membaca peranan pemarkah itu berarti kemampuan menentukan kejatian yang dimaksud (Sudaryanto, 1993: 95). Data yang sudah terklarifikasi kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dan diperkuat dengan pendekatan deskriptif kuantitatif guna menghasilkan frekuensi pemakaian alat pemarkah leksikal berupa repetisi.

Tajuk Rencana Suara Merdeka terdapat hampir di setiap terbitan. Dari sekian Tajuk Rencana antara 1998-2004 tersebut akan disusutkan untuk dijadikan

¹¹ Dewi Yulianti, dkk. *Op Cit.* hlm. 41.

¹² *Ibid.* hlm. 58.

sampel. Jumlah sampel tidak menjadi persoalan, karena yang diperlukan adalah kevalidan data. Oleh sebab itu, pengambilan sampel sebanyak tujuh puluh dua¹³ dirasakan cukup untuk mewakili Tajuk Rencana Suara Merdeka antara tahun 1998-2004. Jumlah sampel yang banyak belum tentu mendapat hasil yang lebih baik, karena dapat mengurangi ketelitian tingkat kajian (peneliti akan disibukkan oleh hal-hal permukaan pada masing-masing sampel).

Penulis menggunakan metode pengambilan sampel acak sederhana. Terlebih dahulu semua unit penelitian (unit elementer) disusun dalam daftar kerangka sampling (*sampling frame*), kemudian dari kerangka sampling ditarik sebagai sampel beberapa unsur atau satuan yang akan diteliti. Dalam hal ini pengambilannya harus dengan cara undian sehingga setiap unit punya peluang yang sama untuk dapat dipilih.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Repetisi

Berikut ini beberapa repetisi yang ditemukan dalam Tajuk Rencana Suara Merdeka antara tahun 1998-2004.

Mengapa Tragedi Semanggi II harus terjadi? Ratap tangis dan penyesalan tak mampu terbendung ketika melihat korban-korban berjatuh dalam aksi unjuk rasa menentang pemberlakuan UU PKB ... Maka ketika kita bertanya **mengapa** dan **mengapa**, memang pertanyaan itulah yang masih menggelayut dalam pikiran serta belum menemukan jawaban.

... **Mengapa** tiba-tiba terancam untuk dicabut lagi. Jalan pikiran seperti itulah yang belakangan muncul, sehingga penolakan terhadap RUU PKB sulit untuk ditawarkan lagi. Pertanyaan dan penyesalan kita, **mengapa** kemudian para wakil rakyat kurang peka dalam membaca keadaan seperti itu? (TR, 27 September 1999)

Dalam penggalan wacana di atas, kata *mengapa* diulang beberapa kali secara berturut-turut untuk menekankan pentingnya kata tersebut dalam konteks tuturan itu. Pengulangan sebanyak tiga kali dalam satu paragraf membuat kata *mengapa* menjadi bagian yang mendapat tekanan, Dalam paragraf berikutnya pun kata *mengapa* masih diulang sebanyak dua kali sehingga membuat satuan lingual

¹³ tujuh puluh dua diperoleh dari 6 tahun (1998-2004) x 12 bulan, jadi setiap bulan terwakili oleh satu sampel.

itu penting kedudukannya sebagai unsur penentu kohesi dalam paragraf tersebut. Kata tanya tersebut muncul karena banyak misteri yang terjadi pada masa reformasi yang belum terjawab.

Mengapa Tragedi Semanggi II harus terjadi? Ratap tangis dan **penyesalan** tak mampu terbendung ketika melihat korban-korban berjatuh dalam aksi unjuk rasa menentang pemberlakuan UU PKB ...
... Pertanyaan dan **penyesalan** kita, mengapa kemudian para wakil rakyat kurang peka dalam membaca keadaan seperti itu? (TR, 27 September 1999).

Kata *penyesalan* pada data (TR, 27 September 1999) diulang sebanyak dua kali sebagai bukti bahwa kata tersebut menjadi topik yang juga penting dalam wacana Tajuk Rencana di atas. Pengulangan kata *penyesalan* merupakan upaya untuk menjelaskan bahwa tragedi Semanggi II dalam konteks wacana tersebut sangat disayangkan terjadi.

Mengapa Tragedi Semanggi II harus terjadi? Ratap tangis dan penyesalan tak mampu terbendung ketika melihat korban-korban berjatuh dalam aksi unjuk rasa menentang pemberlakuan UU **PKB** ...
... Mengapa tiba-tiba terancam untuk dicabut lagi. Jalan pikiran seperti itulah yang belakangan muncul, sehingga penolakan terhadap RUU **PKB** sulit untuk ditawarkan lagi. Pertanyaan dan penyesalan kita, mengapa kemudian para wakil rakyat kurang peka dalam membaca keadaan seperti itu? (TR, 27 September 1999),

Singkatan PKB diulang dua kali dalam penggalan wacana di atas. Hal tersebut menunjukkan bahwa RUU/UU Penanggulangan Keadaan Bahaya menjadi topik yang juga penting dalam wacana Tajuk Rencana di atas. Dalam konteks di atas, UU PKB diyakini sebagai penyulut demonstrasi yang begitu besar.

.... Klimaksnya adalah gugurnya **Yap Yun Hap**, mahasiswa Universitas Indonesia yang terkena berondongan tembakan aparat keamanan. Selain **Yap Yun Hap**, ada lima orang lagi tewas, sedangkan puluhan lainnya luka-luka dan dirawat di rumah sakit ... (TR, 27 September 1999).

Dalam penggalan wacana di atas, nama *Yap Yun Hap* diulang beberapa kali secara berturut-turut untuk menekankan pentingnya kata tersebut dalam konteks tuturan tersebut. Pengulangan sebanyak dua kali dalam satu paragraf membuat nama *Yap Yun Hap* menjadi bagian yang mendapat tekanan. Nama

tersebut dianggap penting karena menandai terjadinya tragedi Semanggi II.

... **Kekerasan** dan **kekerasan** pula yang akhirnya terjadi. Ribuan mahasiswa dan massa tak ada artinya apa-apa ketika dihadapkan pada moncong senjata ... (TR, 27 September 1999).

Kata *kekerasan* pada data (TR, 27 September 1999) diulang sebanyak dua kali dalam sebuah kalimat sebagai bukti bahwa kata tersebut menjadi topik yang juga penting dalam wacana Tajuk Rencana di atas. Pengulangan kata *kekerasan* merupakan upaya untuk menjelaskan bahwa tragedi Semanggi II di awal reformasi penuh dengan peristiwa bentrok yang mengakibatkan kekerasan berulang-ulang.

... Klimaksnya adalah gugurnya Yap Yun Hap, **mahasiswa** Universitas Indonesia yang terkena berondongan tembakan aparat keamanan. Selain Yun Hap, ada lima orang lagi tewas, sedangkan puluhan lainnya luka-luka dan dirawat di rumah sakit. Kekerasan dan kekerasan pula yang akhirnya terjadi. Ribuan **mahasiswa** dan massa tak ada artinya apa-apa ketika dihadapkan pada moncong senjata...

Belum cukupkah korban **mahasiswa** Trisakti sebagai “tumbal” reformasi? Tidak cukupkah pengorbanan **mahasiswa** yang sudah demikian besar untuk proses transisi menuju demokratisasi? Sebenarnya tonggak awal yang baik sudah ditegakkan dan pintu keterbukaan telah dibuka. Yakni ketika kekuasaan Soeharto lebih dari 32 tahun itu harus diakhiri karena tekanan gerakan **mahasiswa**. (TR, 27 September 1999).

Kata *mahasiswa* diulang sebanyak lima kali dalam penggalan wacana di atas. Hal tersebut menunjukkan bahwa *mahasiswa* menjadi subjek yang sangat penting dalam wacana Tajuk Rencana di atas. Dalam konteks di atas, mahasiswa dianggap sebagai ujung tombak reformasi.

Belum **cukupkah** korban mahasiswa Trisakti sebagai “tumbal” reformasi? Tidak **cukupkah** pengorbanan mahasiswa yang sudah demikian besar untuk proses transisi menuju demokratisasi? (TR, 27 September 1999).

Kata *cukupkah* diulang sebanyak dua kali dalam sebuah konstruksi. Satuan lingual tersebut diulang mengingat banyaknya konteks mengenai serangkaian korban luka dan tewas akibat demonstrasi. Kata *cukupkah* menandakan adanya harapan bersama agar bentrokan segera berakhir dan tidak membawa korban lagi.

Seandainya, ya kita memang bisa mengatakan seandainya, **DPR** tidak memaksakan diri mengesahkan RUU itu, mungkin situasinya akan lain. Sejak awal kita mengingatkan pemerintah ataupun **DPR** agar pada masa

transisi ini mementingkan penyelesaian agenda utama yakni mengadakan pemilihan umum dan menggelar SU MPR untuk membentuk pemerintahan baru. (TR, 27 September 1999)

... Secara riil politik, kekuatan 38 kursi TNI di **DPR** dan MPR tidaklah bisa dianggap kecil. ... (TR, 5 Oktober 1999).

Dalam penggalan wacana di atas terjadi repetisi *DPR* sebanyak tiga kali. Satuan lingual tersebut diulang karena sangat penting dalam konteks demokrasi. *DPR* merupakan salah satu lembaga negara yang sangat menentukan jalannya reformasi pada saat itu.

Seandainya, ya kita memang bisa mengatakan **seandainya**, DPR tidak memaksakan diri mengesahkan RUU itu, mungkin situasinya akan lain ... (TR, 27 September 1999).

Kata *seandainya* diulang dua kali dalam sebuah paragraf. hal tersebut menandakan bahwa media pun memiliki harapan-harapan agar kebijakan DPR benar-benar memihak rakyat. hal tersebut juga berarti adanya penyesalan karena DPR mngesahkan RUU PKB sehingga mengakibatkan berbagai demonstrasi dan bentrokan yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa.

Hari ini, Selasa 5 Oktober 1999, Tentara nasional Indonesia (**TNI**) memperingati ulang tahun ke-54. Saatnya bertepatan dengan agenda politik bangsa, yakni Sidang Umum MPR yang akan menjadi pintu gerbang bagi kelanjutan proses reformasi. Maka ini merupakan momentum strategis bagi **TNI** untuk mengimplementasikan reposisi dan redefinisi, terutama terkait dengan peran sosial politiknya seperti dicanangkan seperti tahun lalu. Secara riil politik, kekuatan 38 kursi **TNI** di DPR dan MPR tidaklah bisa dianggap kecil. Justru karena itu faktor **TNI** masih diperhitungkan dalam keseluruhan proses selama SU MPR hingga puncaknya nanti, pemilihan presiden dan wakil presiden. Secara riil politik pula tidaklah mungkin mengesampingkan pengaruh **TNI** atau mengabaikannya untuk ditempatkan di luar arena.

... Dalam proses voting untuk pemilihan ketua MPR terlihat suara **TNI** tidak ke mana-mana ...

Namun setidak-tidaknya **TNI** akan lebih peka dalam menyerap aspirasi rakyat ... Dengan demikian, dukungan **TNI** tidak mubazir dan memberikan kontribusi efektif bagi terbentuknya pemerintahan baru yang lebih kredibel.

Kita mengetahui untuk mendapat jatah 38 kursi juga tidak dapat dikatakan mulus, karena semangat reformasi telah mengumandangkan agar dwifungsi **TNI** dicabut dan segera menarik diri dari peran sosial politiknya untuk kembali ke barak menjadi tentara profesional. Agenda reformasi dengan tegas menyatakan hal itu dan **TNI** pun sudah legawa menerimanya

... Ini sesuatu yang realistis mengingat selama lebih 30 tahun **TNI**, yang dulu disebut ABRI, telah banyak dimanfaatkan untuk bermain langsung dalam kancah politik.

Tuntutan agar segera diadakan reposisi dan redefinisi atas peran **TNI** justru membuktikan kecintaan pada **TNI** yang memang dilahirkan oleh rakyat dan menjadi anak kandung ibu pertiwi. Kita tentu tidak rela **TNI** kehilangan integritas dan kredibilitasnya. ... Akibatnya **TNI** harus sering “berhadapan” dengan rakyat sendiri.

... Barangkali ungkapan itu juga bisa diartikan sama, yakni sekaranglah saat yang tepat bagi **TNI** untuk memperbarui komitmennya terutama mengaktualisasikan amanat reformasi menyangkut dwifungsi ... Namun ada pula yang menganggap terserah **TNI** asal keberpihakannya jelas, yakni demi kepentingan rakyat.

Titik balik yang kritis, seperti dikatakan William Cohen, hendaknya dapat dilalui dengan selamat, sehingga ke depan citr **TNI** dapat segera dipulihkan ... **TNI** pun menyadari tidak ada pilihan lain, kecuali segera mengadakan reposisi, reaktualisasi, dan redefinisi. (TR, 5 Oktober 1999)

... Jujur saja, setelah lepas dari **TNI**, apakah Polri lebih berwibawa ataukah sebaliknya. (TR, 2 Juli 2001)

Menanggapi polemik berkepanjangan dan makin tajam tentang RUU **TNI**, Menko Polkan Susilo Bambang Yudhoyono memberikan peringatan yang sangat menyentuh. Para pejabat **TNI** diimbau mendengarkan kerisauan publik. Saat ini berbagai kelompok masyarakat memberi komentar negatif tentang draf RUU **TNI** ... Namun dia juga mengharapkan, berbagai kelompok masyarakat yang menentang pasal itu untuk memahami posisi **TNI** sebagai penjaga negara ...

...Banyak kelompok masyarakat yang mengkhawatirkan pasal itu menjadi peluang bagi pimpinan **TNI** untuk dengan alasan tertentu mengambil alih kekuasaan dari presiden ... Kritik terhadap RUU itu kemudian mendapat reaksi keras dari kalangan petinggi **TNI**. Misalnya Panglima **TNI** Jenderal **TNI** Endriartono Sutarto dan KSAD Jenderal **TNI** Ryamizard Ryacudu ...

... Bukan tak mungkin, **TNI**, dan jajaran intelijennya telah melihat kemungkinan itu, yang luput dari pengamatan kita semua yang awam.

Konsep yang diajukan **TNI** lewat RUU mungkin bagian dari gagasan untuk menyelesaikan berbagai persoalan itu ... Namun rasanya tidak hanya **TNI**, kita semua sebagai bagian dari bangsa juga tak sabar melihat keadaan itu.

...Seperti telah kita kemukakan, bagian besar rakyat kita belum melupakan kekeliruan peran **TNI** pada masa orde baru. (TR, 8 Maret 2003).

Dalam penggalan wacana di atas, singkatan *TNI* diulang sebanyak tiga puluh tiga kali. Hal tersebut menunjukkan bahwa *TNI* sangat penting dalam wacana-wacana editorial awal reformasi. Dalam konteks ini tidaklah berlebihan apabila media di awal reformasi menjadikan *TNI* sebagai topik yang menarik

karena pada masa orde baru peran *TNI* memang sangat besar dalam menopang kekuasaan Soeharto selama tiga dekade lebih. Apalagi salah satu poin reformasi yang paling penting adalah reformasi militer dan dihapuskannya dwifungsi *TNI* (dahulu ABRI) secara bertahap.

Hari ini, Selasa 5 Oktober 1999, Tentara nasional Indonesia (*TNI*) memperingati ulang tahun ke-54. Saatnya bertepatan dengan agenda politik bangsa, yakni Sidang Umum **MPR** yang akan menjadi pintu gerbang bagi kelanjutan proses reformasi ... Secara riil politik, kekuatan 38 kursi *TNI* di DPR dan **MPR** tidaklah bisa dianggap kecil. Justru karena itu faktor *TNI* masih diperhitungkan dalam keseluruhan proses selama **SU MPR** hingga puncaknya nanti, pemilihan presiden dan wakil presiden ... Tampaknya mereka sangat berhati-hati memainkan perannya dalam Sidang Umum **MPR** kali ini, apalagi di tengah sorotan tajam masyarakat. dalam proses voting untuk pemilihan ketua **MPR** terlihat suara *TNI* tidak ke mana-mana ...
... Melalui kiprahnya di DPR/**MPR** maupun dalam tugasnya sebagai aparat keamanan haruslah dapat mengawal penuh proses demokrasi agar berjalan dengan baik. (TR, 5 Oktober 1999).

Dalam penggalan wacana di atas terjadi repetisi *MPR* sebanyak enam kali dalam tiga paragraf. Singkatan tersebut diulang karena sangat penting dalam konteks demokrasi. *MPR* merupakan lembaga tertinggi negara (saat itu) yang sangat menentukan jalannya reformasi pada saat itu.

Selain peristiwa **kekerasan** yang berskala nasional seperti di Ambon, ada dua jenis tindak **kekerasan** lokal yang juga sangat memprihatinkan, yaitu tawuran penduduk antarkampung dan main hakim sendiri terhadap pelaku kriminal. Dua peristiwa itu belakangan ini sangat menggejala ... (TR, 14 Januari 2000).

Kata *kekerasan* pada data (TR, 14 Januari 2000) diulang sebanyak dua kali dalam sebuah kalimat sebagai bukti bahwa kata tersebut menjadi topik yang juga penting dalam wacana Tajuk Rencana di atas. Pengulangan kata *kekerasan* merupakan upaya untuk menjelaskan bahwa di awal reformasi penuh dengan peristiwa **kekerasan** yang mengakibatkan stabilitas keamanan terganggu.

Selain peristiwa **kekerasan** yang berskala nasional seperti di Ambon, ada dua jenis tindak **kekerasan** lokal yang juga sangat memprihatinkan, yaitu tawuran penduduk antarkampung dan main hakim sendiri terhadap pelaku **kriminal** ... Korban pun makin banyak. Yang sangat memprihatinkan, ada warga masyarakat yang sampai hati membakar pelaku **kriminal** yang tertangkap basah sampai mati. Di Cilacap, pencuri ayam yang tertangkap

basah setelah dikeroyok kemudian disiram bensin dan dibakar ... (TR, 14 Januari 2000).

Kata *kriminal* pada (TR, 14 Januari 2000) diulang sebanyak dua kali dalam sebuah paragraf sebagai bukti bahwa kata tersebut juga penting dalam wacana Tajuk Rencana di atas. Pengulangan kata *kriminal* merupakan upaya untuk menjelaskan bahwa masa-masa awal reformasi yang ditandai krisis multidimensi penuh dengan peristiwa *kriminal* yang mengganggu stabilitas nasional.

Di Cilacap, **pencuri** ayam yang tertangkap basah setelah dikeroyok kemudian disiram bensin dan dibakar. Di daerah sragen, **pencuri** sepeda motor yang tertangkap basah dikeroyok sampai jiwanya melayang ... (TR, 14 Januari 2000).

Dalam (TR, 14 Januari 2000) terdapat repetisi kata *pencuri*. Satuan lingual tersebut sering ditemukan dalam wacana ini sebagai sarana/ himbuan kepada pembaca agar selalu waspada terhadap segala gangguan keamanan di tengah keadaan negara yang belum menentu akibat reformasi yang dibarengi krisis multidimensi. Repetisi tersebut juga menekankan terjadinya aksi pencurian yang kian marak akibat himpitan ekonomi di awal reformasi.

Di Cilacap, pencuri ayam yang **tertangkap basah** setelah dikeroyok kemudian disiram bensin dan dibakar. Di daerah sragen, pencuri sepeda motor yang **tertangkap basah** dikeroyok sampai jiwanya melayang ... (TR, 14 Januari 2000).

Dalam (TR, 14 Januari 2000) terdapat repetisi frasa *tertangkap basah*. Satuan lingual tersebut ditemukan dalam wacana ini sebagai gambaran bahwa di tengah reformasi ABRI masyarakat tetap waspada menghadapi segala gangguan keamanan

Selain peristiwa kekerasan yang berskala nasional seperti di Ambon, ada dua jenis tindak kekerasan lokal yang juga sangat **memprihatinkan**, yaitu tawuran penduduk antarkampung dan main hakim sendiri terhadap pelaku kriminal. Dua peristiwa itu belakangan ini sangat menggejala ... Korban pun makin banyak. Yang sangat **memprihatinkan**, ada warga masyarakat yang sampai hati membakar pelaku kriminal yang tertangkap basah sampai mati ... (TR, 14 Januari 2000).

Kata *memprihatinkan* diulang sebanyak dua kali dalam wacana di atas. Hal tersebut menggambarkan keadaan negara yang benar-benar tidak menentu.

Banyak peristiwa yang sangat memprihatinkan akibat kesulitan ekonomi.

Di Cilacap, pencuri ayam yang tertangkap basah setelah **dikeroyok** kemudian disiram bensin dan dibakar. Di daerah sragen, pencuri sepeda motor yang tertangkap basah **dikeroyok** sampai jiwanya melayang ...
... Mahasiswa sebuah universitas swasta di Malang itu **dikeroyok** penduduk karena dicurigai hendak mencuri ... Rabu tengah malam pekan lalu di Desa Jekani, Sragen, dia **dikeroyok** massa sampai tewas ketika kepergok mengendap-endap bersama dua pria lain. ...
Informasi lain menyebutkan, dia **dikeroyok** karena ketika memasuki desa itu dan ditanyai petugas jaga kampung memberikan keterangan tidak jelas dan mencurigakan ... (TR, 14 Januari 2000).

Dalam penggalan wacana di atas, singkatan *dikeroyok* diulang sebanyak lima kali. Hal tersebut menunjukkan bahwa kata *dikeroyok* sangat penting dalam ini. Dalam konteks ini media di awal reformasi menjadikan kata *dikeroyok* sebagai topik yang menarik karena masyarakat mulai geram terhadap pelaku-pelaku tindak kriminal yang kian merajalela. Masyarakat di tengah himpitan ekonomi melakukan aksi main hakim sendiri sebagai pelarian/ pemuas keputusasaannya pada masa itu. tentu hal ini tidak dibenarkan, makanya media mengangkat topik tersebut agar mengedukasi masyarakat agar tidak main hakim sendiri.

... Mereka juga gampang terpengaruh oleh elite **politik** yang biasa menunggangi massa pendukung. Sebagai contoh, banyak pemimpin organisasi **politik** yang ketika dikritik atau “ditelanjangi” perilaku busuknya oleh pesaing, mengalihkan sasaran dengan mengemukakan khawatir massa pendukungnya tidak bisa menerima perlakuan keras itu ... Hal itu perlu disadari para elite **politik** dan siapa pun yang menjadi pemimpin dengan bersikap, berucap, dan berperilaku lebih hati-hati dan arif. (TR, 14 Januari 2000)

... Bahwa yang tampak ke permukaan melalui liputan luas media massa lebih terkait dengan soal intervensi **politik** ke dalam tubuh Polri, hal itu pun bisa dimaklumi ... Tetapi persoalan kemandirian dikaitkan dengan kepentingan **politik** kekuasaan masih tetap muncul. (TR, 2 Juli 2001)

... Padahal para elite **politik** sudah menyuarakan antikekerasan. Fenomena kekerasan yang terjadi tanpa bisa dikendalikan oleh partai-partai **politik** dan juga merosotnya citra anggota legislatif ... Sebab, pada dasarnya pilar atau institusi demokrasi yang utama adalah partai **politik** ... (TR, 1 Juni 2001).

Kata *politik* pada data (TR, 14 Januari 2000) diulang sebanyak dua kali dalam sebuah kalimat, pada data (TR, 2 Juli 2001), kata *politik* diulang sebanyak

dua kali, sedangkan pada data (TR, 1 Juni 2001) kata *politik* diulang sebanyak dua kali juga. Hal tersebut sebagai bukti bahwa kata *politik* menjadi topik yang juga penting dalam wacana Tajuk Rencana di atas. Pengulangan kata *politik* merupakan upaya untuk menjelaskan bahwa masa reformasi memang sebuah upaya menata ulang tatanan politik bangsa Indonesia.

Ada hal yang unik pada upacara HUT ke-55 **Polri** 1 Juli kemarin di Jakarta, yakni kehadiran Presiden Abdurrahman Wahid sebagai inspektur upacara ... Tetapi peristiwa penonaktifan Bimantoro tetaplah memberikan catatan tersendiri dalam kaitan perjalanan menuju kemandirian dan profesionalisme **Polri**.

... Tentu menjadi kajian yang makin menarik mengingat dalam era reformasi sekarang posisi **Polri** telah mengalami pergeseran paradigma dan perubahan struktural yang berarti.

... Bahwa yang tampak ke permukaan melalui liputan luas media massa lebih terkait dengan soal intervensi politik ke dalam tubuh **Polri**, hal itu pun bisa dimaklumi ... Sementara itu, legitimasi atas kemandirian **Polri** masih harus ditata dengan undang-undang.

... Namun di sisi lain perlakuan terhadap institusi **Polri** yang dianggap kurang bijak juga bisa menimbulkan simpati dari masyarakat.

... Jujur saja, setelah lepas dari TNI, apakah **Polri** lebih berwibawa ataukah sebaliknya. (TR, 2 Juli 2001).

Dalam penggalan wacana di atas, akronim *Polri* diulang sebanyak tujuh kali. Hal tersebut menunjukkan bahwa *Polri* sangat penting dalam wacana-wacana editorial awal reformasi. Dalam konteks ini tidaklah berlebihan apabila media di awal reformasi menjadikan *Polri* sebagai topik yang menarik karena pada masa orde baru *Polri* adalah salah satu bagian dari ABRI yang memang berperan sangat besar dalam menopang kekuasaan Soeharto selama tiga dekade lebih. Apalagi salah satu poin reformasi yang paling penting adalah reformasi militer yaitu pemisahan *Polri* sebagai angkatan keempat dari ABRI (sekarang TNI).

... Termasuk gerakan **separatis** yang kini muncul di Ambon ...

... Sejak awal sikap kita jelas, semua gerakan yang menuju **separatisme** tak boleh dibiarkan ...

... tanpa bermaksud menafikan kemungkinan latar belakang sosialnya, tidaklah keliru bila kita harus mencurigai segala gerakan berbau **separatis** itu sejak dini ...

... Atau, terlalu meraka-reka adanya aktor intelektual di balik berbagai kerusuhan dan aktivitas menuju **separatis** ...

... Dalam situasi seperti itu, sebaiknya yang dilakukan adalah konsolidasi, sekaligus mengantisipasi berbagai ancaman gerakan **separatis**. (TR, 29

April 2002).

Dalam wacana di atas, kata *separatis* diulang sebanyak lima kali. Hal tersebut menunjukkan bahwa pada awal reformasi terjadi gangguan keamanan nasional dalam bentuk gerakan-gerakan separatis yang terjadi di berbagai daerah. Pada masa orde baru, daerah-daerah rawan separatis memang dibungkam dengan operasi militer, yaitu DOM (Daerah Operasi Militer). Memasuki masa reformasi, kebijakan DOM berangsur-angsur ditanggalkan karena ditengarai melanggar HAM. Selain itu, pada masa orde baru, media-media juga diatur secara sangat ketat dan secara implisit dilarang keras memberitakan isu-isu separatisme karena dianggap memojokkan pemerintah dan bisa memengaruhi/ mengubah perspektif masyarakat mengenai keamanan nasional¹⁴. Hal tersebut juga sangat memengaruhi pemilihan kata, pemilihan topik/isu, bahkan penggunaan bahasa yang digunakan media pada saat itu.

Selain peristiwa kekerasan yang berskala nasional seperti di Ambon, ada dua jenis tindak kekerasan lokal yang juga sangat memprihatinkan, yaitu **tawuran** penduduk antarkampung dan main hakim sendiri terhadap pelaku kriminal ...

Selain peristiwa kekerasan yang berskala nasional seperti di Ambon, ada dua jenis tindak kekerasan lokal yang juga sangat memprihatinkan, yaitu **tawuran** penduduk antarkampung dan main hakim sendiri terhadap pelaku ... (TR, 14 Januari 2000)

... **Tawuran** itu dipicu masalah sederhana ...

... Di sana **tawuran** melibatkan ratusan pemuda dari delapan desa di empat kecamatan. Ada **tawuran** yang baru kali ini terjadi, ada yang merupakan dendam lama yang terpendam antara sekelompok pemuda antarkampung ... (TR, 3 Januari 2001).

Kata *tawuran* diulang sebanyak lima kali sebagai bukti bahwa kata tersebut menjadi topik yang penting dalam wacana Tajuk Rencana di atas. Pengulangan kata *tawuran* merupakan upaya pers untuk menjelaskan bahwa di awal reformasi penuh dengan peristiwa *tawuran* yang mengakibatkan stabilitas keamanan terganggu.

... Alasannya **Pak Harto** sakit ...

¹⁴ Lihat, Ketetapan MPRS No. XXXII/MPRS/1966 tentang pembatasan terhadap kebebasan pers; UU No. 11 Tahun 1966; Peraturan Menteri Penerangan No. 03/Per/Menpen/1969; UU No. 21/1982; dan Peraturan Menteri Penerangan No. 01/Per/Menpen/1984.

Ketidakhadiran **Pak Harto** sebenarnya sejak awal sudah diperkirakan ...Keterangan dokter antara lain menyebutkan, **Pak Harto** menderita permanent brain damage. Melihat kenyataan itu, perkembangan dan informasi tentang kesehatannya yang kita lihat dan dengar dari waktu ke waktu, kita cenderung berpendapat **Pak Harto** tak akan bisa dihadapkan ke pengadilan.

... Namun andaikata benar **Pak Harto** tetap tak bisa dihadapkan ke pengadilan, sedah ada beberapa gagasan jalan keluar ...

... Hal itu berkaitan dengan tekad, **Pak Harto** bagaimanapun harus diadili ... (TR, 4 September 2000).

Dalam Tajuk Rencana di atas, *Pak Harto* diulang sebanyak enam kali. Hal tersebut mencerminkan bahwa pada saat reformasi, hal terpenting selain merubah tatanan politik negara, adalah melengserkan dan mengadili *Pak Harto* yang diduga menyalahgunakan jabatannya selama lebih dari tiga dekade. Topik berita semacam ini adalah angin segar bagi kebebasan pers masa reformasi. Pada saat 1966-1998, isu-isu yang menyebutkan berita miring mengenai orang nomor satu orde baru semacam ini sangat dilarang keras.

... Dari mana lagi diperoleh 48 yste bukan karena **KKN**?

... Selain harus ditelusuri lebih lanjut dan bila diduga ada indikasi **KKN** harus dibuktikan di pengadilan terlebih dahulu, Sebagian pejabat mungkin juga memperolehnya dengan sah ...

... Harus tetap ditelusuri tentang kemungkinan terjadi tindak **KKN**.

... Kita desak Presiden Megawati yang juga getol bicara soal **KKN** untuk tindak tinggal diam, apa lagi kasusnya menyangkut Jaksa Agung ...

... Kepercayaan terhadap komitmen pemerintah memberantas **KKN** akan makin merosot ... (TR, 7 Oktober 2002)

... Mereka yang tak setuju tentu menganggap LSM itu telah “dibeli” sehingga tidak akan mampu bersuara kritis atau mempunyai nyali lagi membongkar berbagai dengan **KKN** yang antara lain juga terkait dengan penyalahgunaan dana APBD ...

Bisa saja, dan itu sah-sah saja, sebuah kebijakan yang tentu juga disertai aliran dana untuk mendukung LSM-LSM yang mampu menjadi pengawas pembangunan termasuk menginvestigasi dugaan **KKN** ...

... Lebih dari itu, pertanggungjawaban secara material dalam arti seberapa banyak kinerja yang dihasilkan dalam kaitan penyelidikan kasus-kasus **KKN**...

... Di antara ratusan bahkan mungkin ribuan kasus **KKN**, mengapa hanya beberapa yang diungkap ke permukaan ... (TR, Selasa, 13 Januari 2004).

Dalam Tajuk Rencana di atas (TR, 7 Oktober 2002), singkatan *KKN* diulang sebanyak lima kali. Sedangkan dalam Tajuk Rencana (TR, 13 Januari

2004) *KKN* diulang sebanyak empat kali. Hal tersebut merupakan penekanan bahwa *KKN* merupakan salah satu masalah yang dihadapi bangsa Indonesia pada saat itu. Repetisi *KKN* dianggap wajar karena *KKN* selama orde baru merupakan salah satu alasan terjadinya reformasi.

Undang-undang yang kemudian menimbulkan beda pendapat cukup tajam adalah UU No.22/1999 tentang Pemerintahan Daerah. Banyak ahli yang menilai UU otonomi itu terlalu liberal. Dalam sebuah negara kesatuan, UU itu dinilai tidak pas karena malah memberikan kebebasan jauh bebas luas dibandingkan dengan dalam 49system federasi ...

Konflik itu sampai menimbulkan tuduhan bahwa dengan perbuatannya Presiden dituduh telah melanggar UU ...

... Banyak UU yang berkesan dibuat tergesa-gesa ...

UU tentang BI dan tentang otonomi adalah dua contoh. Masih ada UU lain yang terkesan serupa. Misalnya UU tentang Ketenagakerjaan. UU tentang Parpol, UU tentang Pemilihan Umum, dan UU Sisdiknas. UU itu terlalu diwarnai kepentingan partai-partai politik. Sudah ada yang diubah, seperti UU Pemilu dan UU Susduk DPR/MPR, DPR, DPRD, namun lebih banyak yang berkesan “dipaksakan” berlaku. Jangankan UU, dalam amendemen UUD pun banyak segi yang dinilai menyimpang dari cita-cita dasarnya ...

Kalangan DPR ada yang menuduh presiden telah melanggar UU ... (TR, 20 Agustus 2003)

Sebagaimana diatur dalam UU, MK memiliki empat wewenang. Yaitu menguji UU terhadap UUD 1945, sengketa antara Lembaga negara yang memperoleh kewenangan dari UUD, serta sengketa dalam pembubaran partai politik dan yang menyangkut pemilu ...

... Selama era reformasi memang banyak sekali beda pendapat di tingkat yang berkaitan dengan masalah kewenangan yang diberikann oleh UU ...

Sebagai contoh UU tentang BI yang pada waktu itu, pada era kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid ... (TR, 13 Januari 2004).

Dalam Tajuk Rencana di atas, singkatan *UU* diulang beberapa kali. Hal tersebut menunjukkan bahwa *UU* sangat penting dalam wacana-wacana editorial awal reformasi. Dalam konteks ini tidaklah berlebihan apabila media di awal reformasi menjadikan *UU* sebagai topik yang menarik karena pada masa orde baru banyak *UU* yang mengekang kebebasan dan *UU* tersebut memang berperan sangat besar dalam menopang kekuasaan Soeharto selama tiga dekade lebih. Apalagi salah satu poin reformasi yang paling penting adalah menyusun atau mengamandemen *UU* yang dianggap menyeleweng dari Pancasila

Dugaan **korupsi** yang dilakukan DPRD Jawa Tengah lewat APBD sedang

diselidiki oleh Kejaksaan Tinggi ... Tidak semestinya kita berpretensi untuk memastikan bahwa telah terjadi **korupsi** di tubuh Dewan karena haruslah tetap dipegang asas praduga tak bersalah ...

Kasus dugaan **korupsi** di DPRD Jateng berawal dari laporan Komite Penyelidikan dan Pemberantasan **Korupsi**, Kolusi, dan Nepotisme (KP2KKN) kepada Kejaksaan Tinggi ...

... Jadi, mereka tidak menganggap sebagai **korupsi** karena hal itu tak lebih dari upaya untuk penambahan dukungan anggaran guna meningkatkan kinerja industri ... (TR, 30 Juli 2004).

Dalam Tajuk Rencana (TR, 30 Juli 2004) kata *korupsi* diulang sebanyak lima kali. Hal tersebut merupakan penekanan bahwa *korupsi* merupakan salah satu masalah yang dihadapi bangsa Indonesia pada saat itu. Editorial tersebut berusaha mengangkat tema tersebut sebagai penekanan bahwa salah satu hal yang menyebabkan reformasi berkobar adalah korupsi yang dilakukan oleh pejabat yang semestinya memihak rakyat.

4.2. Frekuensi Repetisi

Berdasarkan beberapa sampel Tajuk Rencana tahun 1998-2004 yang diteliti, diperoleh distribusi repetisi sebagai berikut.

Tabel 1. Frekuensi Repetisi

No.	Kata/Frasa	F
1	mengapa	5
2	PKB (Penanggulangan Keadaan Bahaya)	2
3	penyesalan	2
4	Yap Yun Hap	2
5	kekerasan	2
6	mahasiswa	5
7	DPR	3
8	seandainya	2
9	TNI	33
10	MPR	6

11	kekerasan	2
12	kriminal	2
13	pencuri	2
14	tertangkap basah	2
15	memprihatinkan	2
16	dikeroyok	5
17	politik	8
18	Polri	7
19	separatis	5
20	tawuran	5
21	Pak Harto	6
22	KKN	9
23	UU	20
24	korupsi	5

5. Simpulan

Berdasarkan analisis di atas, dapat diambil simpulan bahwa topik yang dominan dalam Tajuk Rencana Suara Merdeka 1998-2004 adalah mengenai persoalan-persoalan nasional saat itu, yaitu reposisi Tentara Nasional Indonesia (TNI); Undang-Undang (UU); Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN); MPR; Polri; Pak Harto; tawuran; separatis; pengeroyokan; dan gangguan keamanan lainnya.

Topik-topik tersebut menjadi ciri khas tema dalam pers era reformasi karena di era sebelumnya (orde baru) media dilarang keras: membicarakan, memberi usulan, apalagi mengkritik peran ABRI (TNI dan Polri) dalam politik praktis; menafsirkan Undang-Undang selain versi pemerintah, apalagi mengamandemen UUD 1945; menyinggung KKN yang dilakukan pejabat; membuat berita yang menyinggung Soeharto; dan memberitakan gangguan-gangguan keamanan yang seolah olah pemerintah tidak bisa mengatasinya. Di masa reformasi, semua topik tabu di atas diangkat dan dikupas secara mendalam, khususnya dalam editorial/ tajuk rencana.

Berdasarkan topik-topik di atas, dapat dikatakan bahwa bahasa pers di era

reformasi menyajikan informasi apa adanya, berbeda dari masa orde baru yang eufemistik. Tidak hanya itu, yang terpenting adalah topik-topik yang disajikan benar-benar aktual karena reformasi telah membuat pers berani menerobos batas-batas pemberitaan yang pada masa orde baru dianggap terlarang dan tabu.

6. Daftar Pustaka

- Brown, G dan G Yule. 1996. *Analisis Wacana* (edisi terjemahan). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Hadi, Nikolaus Rendi P. 2016 “Bahasa Indonesia sebagai Identitas Bangsa dalam Tantangan” dalam *Majalah Pendidikan Genta* . (No,12/tahun XI). Grobogan.
- Halliday, MAK dan Ruqaiyah Hasan. 1976. *Cohesion in English*. London: Longman.
- _____. 1992. *Bahasa, Konteks, dan Teks:Aspek-Aspek Bahasa dalam Pandangan Semiotik Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Kushartanti, dkk.. 2007. *Pesona Bahasa: Langkah Awal Memahami Linguistik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Mulyana. 2003. *Kajian Wacana: Teori, Metode, dan Aplikasi Prinsip-prinsip Analisis Wacana*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Redaktur Tajuk Rencana. 1999. “Mengapa Tragedi Semanggi II Harus Terjadi” dalam *Suara Merdeka*. 27 September. Semarang.
- _____. 1999. “Sekaranglah Momentum bagi Reposisi TNI” dalam *Suara Merdeka*. 5 Oktober. Semarang.
- _____. 2000. “Keterbukaan, Kekerasan, dan Toleransi” dalam *Suara Merdeka*. 14 Januari. Semarang.
- _____. 2000. “Sudah Terlalu Lama Ambon Menderita” dalam *Suara Merdeka*. 27 Juni. Semarang.
- _____. 2000. “pemikiran-Pemikiran tentang Peradilan Pak Harto” dalam *Suara Merdeka*. 4 September. Semarang.
- _____. 2001. “Anarkisme Massa, Kita Makin Cemas” dalam *Suara Merdeka*. 3 Januari. Semarang.

_____. 2001. "Polri di Tengah Masa-Masa Perubahan" dalam *Suara Merdeka*. 2 Juli. Semarang.

_____. 2002. "Tak Ada Toleransi bagi Gerakan Separatis" dalam *Suara Merdeka*. 29 April. Semarang.

_____. 2002. "Kasus MA Rachman, Potret Kebanyakan Pejabat Kita?" dalam *Suara Merdeka*. 7 Oktober. Semarang.

_____. 2003. "Dengarkan Kerisauan Publik" dalam *Suara Merdeka*. 8 Maret. Semarang.

_____. 2003. "Mengharap MK Mampu Berperan Lain" dalam *Suara Merdeka*. 20 Agustus. Semarang.

_____. 2004. "Lembaga seperti KP2KKN Justru Perlu Diperkuat" dalam *Suara Merdeka*. 13 Januari. Semarang.

_____. 2004. "Tentang kasus Dugaan Korupsi DPRD Jateng" dalam *Suara Merdeka*. 30 Juni. Semarang.

Singarimbun, Masri & Effendi Sofian. 1983. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: Pustaka LP3S Indonesia.

Sudarto, dkk. 2004 *Meletakkan Demokrasi: Tajuk Rencana Suara Merdeka*. Semarang: Yayasan Karyawan Suara Merdeka.

Sudaryanto. 1993. *Metode dan Aneka Teknik Bahasa*. Yogyakarta: Duta Wacana University Press.

Sumarlam, dkk. 2009. *Teori dan Praktik Analisis Wacana*. Surakarta: Cakra Surakarta.

Yuliati, Dewi, dkk. 2008. *Melacak Jejak Pers Jawa Tengah*. Semarang: PWI Jateng.